

BAB I

PENDAHULUAN

Salah satu hasil pertemuan dan menjadi keputusan politik dalam KTT ASEAN ke-20 yang dilaksanakan di Kamboja pada tanggal 3-4 April 2012 adalah semakin kuatnya kesepakatan pembentukan *ASEAN Economic Community* (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan direalisasikan pada tahun 2015. Masyarakat Ekonomi ASEAN menunjukkan terjadinya kelompok masyarakat-politik keamanan, ekonomi dan sosio-kultural budaya yang memengaruhi kehidupan seluruh penduduk yang mendiami negara-negara yang terletak di kawasan ASEAN.¹

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan kondisi ASEAN saat ini jauh lebih maju dibandingkan dengan keadaan pada tahun 1967 pada saat ASEAN didirikan. Pada saat itu, negara-negara ASEAN hanya berupa wadah perkumpulan atau organisasi sekawasan yang dimanfaatkan sebagai wadah politik oleh 5 negara anggotanya menghadapi situasi perang dingin. Namun, sejalan dengan perkembangan politik dan ekonomi dunia, kawasan ASEAN semakin berperan dalam membentuk kebijakan ekonomi. Pada tahun 1992, *ASEAN Free Trade Agreement* (AFTA) yang akan menurunkan tarif

1BPPN : Kajian Kesiapan Sektor Pertanian dalam Menghadapi Pasar Tunggal 2015 , diakses dari http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdf/files/RPTP_2014_08.pdf pada 3 Agustus 2015

sejumlah produk sebesar 0-5 persen disepakati untuk diberlakukan pada tahun 2003.² Kerjasama ekonomi terus ditingkatkan dengan tuntutan dan perkembangan ekonomi dan saat ini seluruh negara Asia Tenggara bersiap menghadapi pasar tunggal yang akan menghilangkan berbagai hambatan dan membebaskan barang atau komoditas keluar atau masuk bersaing di pasar global.

Bagi Indonesia, pasar tunggal ASEAN atau *ASEAN Economic Community* (AEC) menjadi sebuah tantangan sekaligus peluang untuk mengembangkan produk dalam negeri agar mampu bersaing di pasar ASEAN. Dalam konteks ini, pasar Indonesia dituntut dan harus dipacu untuk menghadapi serbuan berbagai produk sejenis di pasar tunggal AEC 2015. AEC akan menjadikan Asia Tenggara sebagai kawasan yang ditandai dengan kebebasan arus barang, jasa, investasi, pekerja terampil, dan arus modal yang lebih bebas. Pembentukan *ASEAN Economic Community* (AEC) juga akan menjadikan Asia Tenggara sebagai kawasan yang mempunyai daya saing tinggi dengan tingkat pembangunan ekonomi yang merata dan terintegrasi dalam ekonomi global.

Pada satu sisi, pembentukan AEC akan memberikan peluang bagi Indonesia untuk memperluas cakupan skala ekonomi, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi, meningkatkan daya tarik sebagai tujuan investor, mengurangi biaya transaksi perdagangan, memperbaiki fasilitas perdagangan dan bisnis, serta meningkatkan daya saing sektor produksi. Namun pada sisi lain, pembentukan

² Ibid

ASEAN Eonomic Community menimbulkan tantangan bagi Indonesia berupa keharusan untuk meningkatkan daya saing melalui peningkatan efisiensi dalam segala aspek khususnya di sektor pertanian.

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Sejarah Indonesia sejak masa kolonial sampai sekarang tidak dapat dipisahkan sektor pertanian dan perkebunan, karena sektor-sektor ini memiliki arti yang sangat penting. Indonesia sebagai negara agraris yang kaya akan hasil pertanian, menjadikan sektor pertanian mempunyai peranan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian Indonesia. Namun, pembangunan pertanian di Indonesia hingga saat ini masih belum dapat menunjukkan hasil yang maksimal jika dilihat dari kesejahteraan para petani. Sektor ini kurang mendapatkan perhatian secara serius dari pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat dari proteksi, kredit, bahkan kebijakan lain tidak ada satupun yang menguntungkan bagi sektor pertanian.³

Jika dilihat dari beberapa data tentang kondisi Indonesia dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, Indonesia masih kalah dalam banyak hal dengan Thailand dan Philipina. Apalagi dibanding Brunei, Malaysia, dan Singapura. Keunggulan Indonesia hanya dilihat dari segi luas negara, jumlah penduduk yang banyak, dan

3 Paskomnas : Kondisi Pertanian Indonesia saat ini Berdasarkan Pandangan Mahasiswa Pertanian Indonesia . diakses dari <http://www.paskomnas.com/id/berita/Kondisi-Pertanian-Indonesia-saat-ini-Berdasarkan-Pandangan-Mahasiswa-Pertanian-Indonesia.php> pada 3 Agustus 2015

sumberdaya melimpah.⁴ Indonesia adalah negara terbesar di ASEAN, baik dari segi kewilayahan maupun jumlah penduduk, serta memiliki sumber daya alam yang melimpah dan negara yang memiliki kapasitas untuk bersaing dalam ASEAN Economic Community. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki kelimpahan sumber daya alam yang dapat dilihat dari keanekaragaman tanaman pada setiap wilayah yang berbeda, ditunjang dengan kondisi sebagian besar lahan yang subur, sehingga memungkinkan tumbuhnya tanaman dengan baik. Hal tersebut seharusnya dapat membantu Indonesia dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Akan tetapi karena belum mendapatkan dukungan fasilitas yang memadai, Indonesia masih bergantung pada barang impor. Dan dampak lainnya yaitu usaha pertanian di Indonesia sampai saat ini masih banyak didominasi oleh usaha dengan skala kecil, modal terbatas, penggunaan teknologi yang masih sederhana, sangat dipengaruhi musim, wilayah pasarnya yang masih lokal, akses terhadap kredit, teknologi dan pasar sangat rendah, serta pasar komoditi pertanian yang dikuasai pedagang-pedagang besar. Selain itu, masih ditambah lagi dengan permasalahan-permasalahan yang menghambat pembangunan pertanian Indonesia seperti pembaruan agraria (konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian) yang semakin tidak terkendali, seperti semakin pesatnya pembangunan hotel di pulau Jawa, padahal pulau ini sangat cocok untuk dijadikan wilayah pertanian. Sedangkan daerah yang kurang

⁴ Sp.beritasatu.com/home/posisi-indonesia-di-asean-mengkhawatirkan/51239 diakses pada 29 mei 2015

subur justru masih terbelakang dan malah dijadikan lahan kosong serta lahan pertanian yang kurang baik.

Dilihat dari daya saingnya, banyak produk pertanian Indonesia kalah saing di pasar global, hal ini dikarenakan pemerintah Indonesia tidak mampu mengenali produknya sendiri. Sebagai contoh beberapa produk pertanian luar negeri seperti beras yang membanjiri pasar Indonesia.

Sampai saat ini Indonesia juga belum mampu melakukan bisnis hasil turunan dari produk pertanian, dalam arti Industri hilir. Indonesia hanya mampu menjadi kuli yang banyak diatur pengusaha yang bergerak di Industri hilir. Padahal hasil pertanian Indonesia melimpah ruah. Hal tersebut dikarenakan Indonesia tidak mempunyai sumber daya manusia yang profesional dan teknologi yang tidak memadai, sehingga saat ingin mengolah hasil turunan dari produk pertanian tidak adanya sarana dan prasarannya.⁵

Studi Bank Dunia (2013) menyebutkan, daya saing produk ekspor Indonesia relatif tertinggal dibanding negara-negara ASEAN lain, terutama kaitannya dengan nilai tambah produk ekspor.⁶ Komposisi ekspor terbesar Indonesia didominasi komoditas pertanian dan barang mentah. Kondisi ini menyebabkan ekspor Indonesia rentan dengan gejolak harga. Ekspor kita melemah akibat pelemahan perekonomian dunia yang menyebabkan harga komoditas dunia juga ikut menurun. Berbeda dengan

5 UINJKT ONLINE: Daya Saing Produk Pertanian Indonesia Kalah di Pasar Global , diakses dari <http://old.uinjkt.ac.id/index.php/arsip-berita-utama/666-daya-saing-produk-pertanian-indonesia-kalah-di-pasar-global.html> pada 3 Agustus 2015

6 m.koran-sindo.com/read/948711/161/Indonesia-dan-mea-1420872853 diakses pada 29 mei 2015

Singapura, Malaysia, dan Thailand, sebagian besar eksportnya didominasi oleh produk-produk yang telah disentuh teknologi (medium and high tech product).

Berdasarkan data dari BPS, impor tanaman pangan menempati 74% dari total impor yang dilakukan pemerintah. Sedangkan impor peternakan, hortikultura, dan perkebunan sebesar 8 – 9%. Pada Desember 2013, ekspor perkebunan meliputi minyak sawit, kelapa, karet dan gula tebu sebesar 96%.⁷ Namun produk perkebunan yang diekspor merupakan bahan mentah dan sebagian impor merupakan bahan jadi. Impor dilakukan sebagian besar untuk konsumsi, bukan untuk proses produksi. Dan ironisnya, sebagian bahan pangan yang diimpor Indonesia justru bisa dihasilkan di negeri sendiri, seperti kentang, teh, cengkeh, jagung, hingga beras.⁸ Bahkan menurut data impor kementerian pertanian, Indonesia tidak hanya impor bahan pangan, tetapi dari bibitnya pun Indonesia melakukan impor. Hal ini menunjukkan sangat tergantungnya pemenuhan konsumsi domestik terhadap impor.

Kondisi infrastruktur kita juga relatif tertinggal. Infrastruktur logistik kita misalnya, berdasarkan Logistics Performance Index (LPI) 2012 yang dikeluarkan Bank Dunia, Indonesia hanya menduduki peringkat ke-59 atau jauh di bawah Singapura yang berada di puncak di antara 155 negara yang disurvei.⁹ Posisi dan daya

7 www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen diakses pada tanggal 13 mei 2015

8 Liputan6 : Daftar 29 Bahan Pangan yang Diimpor RI sampai November , diakses dari <http://bisnis.liputan6.com/read/791549/daftar-29-bahan-pangan-yang-diimpor-ri-sampai-november> pada 29 mei 2015

saing industri logistik Indonesia bahkan kalah dibanding Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina dan hanya unggul terhadap Myanmar dan Kamboja.¹⁰

Dalam perdagangan bebas yang dilakukan dalam *ASEAN Economic Community*, berdasarkan *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) ada beberapa kriteria barang yang diperjual belikan, berikut CEPT Produk List;¹¹

- *Inclusion List* (IL) : daftar yang memuat cakupan produk yang harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Produk tersebut harus disertai *Tarif Reduction Schedule*.
 - b. Tidak boleh ada *Quantitative Restrictions* (QRs).
 - c. *Non-Tarif Barriers* (NTBs) lainnya harus dihapuskan dalam waktu 5 tahun.
- *Temporary Exclusion* (TEL) : daftar yang memuat cakupan produk yang sementara dibebaskan dari kewajiban penurunan tarif, penghapusan QRs dan NTBs lainnya serta secara bertahap harus dimasukkan ke dalam IL.
- *Sensitive List* (SL) : daftar yang memuat cakupan produk yang diklasifikasikan sebagai *Unprocessed Agricultural Products*. Contohnya beras,

⁹Okezone :MEA 2015 dan Daya Saing Kita, diakses dari <http://economy.okezone.com/read/2014/03/24/23/959646/mea-2015-dan-daya-saing-kita> pada 29 mei 2015

¹⁰ ibid

¹¹ DEPKEU : ASEAN FREE TRADE AREA , <http://www.tarif.depkeu.go.id/Others/?hi=AFTA> diakses pada 29 juli 2015

gula, gandum, bawang putih, dan cengkeh, serta produk tersebut juga harus dimasukkan ke dalam CEPT *Scheme* tetapi dengan jangka waktu yang lebih lama. Contohnya Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philipina, Thailand harus telah memasukkan produk yang ada dalam SL ke dalam IL pada tahun 2010, Vietnam pada tahun 2013, Laos dan Myanmar pada tahun 2015, serta Kamboja pada tahun 2017.

- *General Exception (GE) List* : daftar yang memuat cakupan produk yang secara permanen tidak perlu untuk dimasukkan ke dalam CEPT *Scheme* dengan alasan keamanan nasional, keselamatan/kesehatan umat manusia, binatang dan tumbuhan, serta pelestarian objek arkeologi, dan sebagainya. Contohnya antara lain senjata, amunisi, dan narkotika.

KTT ASEAN ke-9 tanggal 7-8 Oktober 2003 di Bali, dimana enam negara anggota ASEAN Original Signatories of CEPT AFTA yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapura dan Thailand, sepakat untuk mencapai target bea masuk dengan tingkat tarif 0% minimal diaplikasikan sebanyak 60% dari Inclusion List (IL) tahun 2003; bea masuk dengan tingkat tarif 0% minimal diaplikasikan sebanyak 80% dari Inclusion List (IL) tahun 2007; dan pada tahun 2010 seluruh tarif bea masuk dengan tingkat tarif 0% harus sudah 100% direalisasikan.¹²

12 Ibid

Untuk anggota ASEAN yang baru, tarif 0% tahun 2006 untuk Vietnam, tahun 2008 untuk Laos dan Myanmar dan tahun 2010 untuk Cambodja.¹³

Pemindahan produk bahan pangan seperti beras dan kedelai dari *Sensitive List* ke *Inclusion List* menandakan bahwa perdagangan bebas yang akan diselenggarakan AEC pada sektor pertanian, seperti produk bahan pangan akan dibebaskan dari pemungutan tarif dan non-tarif , serta tanpa batasan kuota. Artinya, persaingan perdagangan produk pertanian akan semakin ketat, baik dari segi harga maupun kualitas. Selama ini, tarif impor pangan sebesar 2,5 persen.¹⁴ Sehingga harga barang impor yang akan dibebaskan dari tarif akan menjadikan harga produk tersebut semakin murah tanpa mengurangi kualitas produk tersebut. Sedangkan kuota impor produk tanaman pangan yang dilakukan Indonesia masih sangat besar. Apabila daya saing produk lokal tidak ditingkatkan, akan memberikan ancaman terhadap petani lokal.

Tergabungnya Indonesia dalam *ASEAN Economic Community* diharapkan menjadi sebuah jembatan bagi Indonesia untuk dapat bersaing dalam pasar internasional. Faktanya, Indonesia belum memiliki sektor yang dapat dijadikan komoditas ekspor andalan untuk dapat bersaing dalam *ASEAN Economic Community*, hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara konsumtif dalam keanggotaan ASEAN, padahal Indonesia memiliki banyak faktor produksi untuk dapat diolah dan

13 Ibid

14 Koran Jakarta : Hindari Bencana Pangan, Naikkan Tarif Impor . diakses dari <http://www.koran-jakarta.com/?31833-hindari%20bencana%20pangan,%20%20naikkan%20tarif%20impor> pada 1 Agustus 2015

dijadikan komoditas ekspor yang menghasilkan untuk dapat diperjualbelikan dalam *ASEAN Economic Community*.

Ketergabungan Indonesia dalam *ASEAN Economic Community* dikhawatirkan hanya akan menjadikan Indonesia sebagai negara yang dapat di eksploitasi oleh negara-negara maju ASEAN sebab tidak adanya perhatian dari pemerintah mengenai perkembangan sektor pertanian, kesiapan yang belum maksimal dalam menghadapi AEC yang menjadikan Indonesia sebagai negara konsumtif yang kurang mampu menjual hasil produksi komoditas ekspor asli Indonesia, karena faktanya Indonesia sampai tahun 2015 belum menunjukkan kenaikan produksi sektor pertanian yang signifikan untuk dijadikan sebagai komoditas ekspor unggulan yang dapat menghasilkan dalam *ASEAN Economic Community*.

Adapun subsektor pertanian meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memfokuskan bahasan yaitu pada subsektor tanaman pangan, karena subsektor ini dinilai kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Sedangkan Indonesia merupakan negara agraris, sehingga produksi tanaman pangan masih memegang peranan penting dalam perekonomian negara dan juga terhadap pemenuhan kebutuhan pangan di Indonesia. Penulis juga ingin memaparkan bahwa kurangnya perhatian pemerintah terhadap subsektor pangan dapat memberikan dampak buruk bagi Indonesia. Salah satunya adalah kurangnya daya saing Indonesia dalam menghadapi pasar bebas *ASEAN Economic Community* yang dimungkinkan akan memberikan ancaman terhadap petani lokal.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari penjabaran latar belakang masalah penulis menemukan suatu pokok permasalahan yang ingin dikaji lebih dalam, yaitu

Bagaimana ASEAN Economic Community dapat menjadi ancaman bagi sektor tanaman pangan Indonesia ?

C. KERANGKA TEORI

Kerangka pemikiran yang berupa teori atau konsep merupakan bentuk penjelasan umum yang menjelaskan mengapa sesuatu itu bisa terjadi dan kapan sesuatu itu terjadi. Sehingga, selain dipakai untuk eksplanasi, kerangka pemikiran juga menjadi dasar untuk prediksi. Teori memberikan Suatu tatanan intelektual terhadap pokok kajian hubungan internasional, memberikan suatu tatanan intelektual terhadap pokok kajian hubungan internasional.

Teori memungkinkan kita untuk membuat konseptualisasi dan kontekstualisasi peristiwa-peristiwa dimasa lalu ataupun masa kini.¹⁵ Sehingga teori dapat memudahkan kita untuk melakukan interpretasi terhadap fenomena ataupun peristiwa yang ada disekililing kita. Dan dengan adanya konsep atau teori ini kita dapat terbantu untuk berpikir logis sehingga menghasilkan suatu pernyataan yang rasional.

¹⁵Burchill, Scott, ndrew Linklater. *Teori-Teori Hubungan Internasional*. Bandung.2009.Nusa Media.

1. Regionalisme Ekonomi

Salah satu konsep yang digunakan oleh penulis adalah konsep Regionalisme Ekonomi. Sebelum masuk lebih jauh mengenai konsep ini ada baiknya terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud Regionalisme Ekonomi. Istilah regionalisme berasal dari kata 'regional' ditambah 'isme'. Region dalam perspektif hubungan internasional merupakan unit terkecil dari suatu negara yaitu *nation-state*. Sedangkan regional merupakan dua atau lebih negara (*nation-state*) yang letaknya secara geografis berdekatan. Berdasarkan pengertian tersebut maka regionalisme dapat dimaknai secara sederhana sebagai suatu kerjasama antara satu negara dengan negara yang lain dalam suatu kawasan.

Meskipun demikian kedekatan geografis saja tidaklah cukup untuk menyatukan negara dalam suatu kawasan. Hettne dan Soderbaun mengemukakan bahwa kedekatan geografis tersebut perlu didukung adanya kesamaan budaya, keterikatan sosial dan sejarah yang sama. Dengan demikian, syarat terbentuknya suatu kawasan dapat terpenuhi secara geografis dan struktural. Dengan logika tersebut, seharusnya seluruh kawasan di belahan bumi manapun dapat mendeklarasikan diri sebagai satu kawasan yang sama. Namun pada kenyataannya tidak semua kawasan memiliki intensitas interaksi dan kemajuan yang sama antara satu kawasan dengan kawasan yang lainnya.¹⁶

16 Beeson Hettne,. The New Regionalism : A Prologue. In Hettne,B. (ed), The New Regionalism and the Future of Security Development, Vol.4. London : Macmillan, 2000.

Regionalisme sendiri memiliki perjalanan sejarah yang panjang, dimana isu regional ini pertama kali muncul pada Perang Dunia I, antar negara- negara Eropa yang saling berkoalisi satu sama lain untuk menumbangkan lawannya dalam arena perang. Isu regionalisme ini kemudian berlanjut pada pada banyak organisasi sekawasan setelah Perang Dunia II, yang dibuktikan dengan berdirinya Liga Arab dan Eropa Barat.¹⁷ Kemudian pengaplikasian pembentukan organisasi sekawasan ini dilanjutkan dengan berdirinya banyak organisasi- organisasi di Asia, salah satunya adalah ASEAN.

Adapun proses-proses yang mejadi ciri-ciri dari berlangsungnya regionalisme menurut Andrew Hurrell, adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Regionalisasi, merupakan proses pertumbuhan integrasi masyarakat dalam suatu wilayah dalam proses interaksi sosial dan ekonomi yang cenderung tidak terarah. Proses ini sifatnya alami dimana negara-negara yang bertetangga ataupun secara geografis berdekatan melakukan serangkaian kerjasama dengan sendirinya. Kerjasama dilakukan dengan dasar untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi sendiri oleh sebuah negara.

¹⁷ M Griffiths dan T O'Callaghan, (2002), *International Relations: The Key Concepts*, London: Routledge. Hal 59.

¹⁸Nuraeni S, at al., 2010. *Regionalisme Dalam Studi Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 6

2. Kesadaran dan identitas regional, merupakan persepsi bersama tentang rasa memiliki pada suatu komunitas tertentu dengan faktor internal sebagai pengikat yang pada umumnya adalah kesamaan budaya, sejarah atau tradisi agama. Kesadaran regional sering pula didefinisikan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan pihak lain, misalnya menyangkut ancaman keamanan.
3. Kerjasama regional antarnegara, merujuk pada aktivitas kerjasama regional yang menunjukkan interdependensi termasuk negosiasi-negosiasi bilateral sampai pembentukan rezim yang dikembangkan untuk memelihara kesejahteraan, meningkatkan nilai-nilai bersama, serta memecahkan masalah bersama terutama yang timbul dari meningkatnya tingkat interdependensi regional.
4. Integrasi regional yang didukung negara, integrasi ekonomi regional merupakan salah satu hal penting dalam kerjasama regional. Tahap awal integrasi biasanya berpusat pada pengurangan hambatan perdagangan dan pembentukan *custom union*, yaitu tahap integrasi ekonomi yang ditandai dengan adanya kesepakatan penentuan tarif bersama secara internal serta mempermudah mobilisasi orang dan barang. Hal ini kemudian berlanjut pada perluasan dengan penghapusan hambatan non-tarif, regulasi pasar dan pengembangan kebijakan bersama baik dalam tataran mikro maupun makro. Regionalisme seringkali disimpulkan sebagai integrasi ekonomi regional bila

melihat model Eropa, walaupun ekonomi hanya merupakan salah satu aspek dari keseluruhan proses.

5. Kohesi regional, yaitu kemungkinan kombinasi dari keempat proses yang telah disebutkan sebelumnya mengarah pada terbentuknya unit regional yang kohesif dan terkonsolidasi. Hal ini terlihat dari berbagai model termasuk pembentukan organisasi supranasional secara bertahap dalam konteks peningkatan integrasi ekonomi.

ASEAN Economic Community merupakan bentuk aplikasi dari regionalisme ekonomi ASEAN. Sesuai dengan pandangan Andrew Hurrell, Kerjasama regional dalam *ASEAN Economic Community* mengarah pada aktivitas kerjasama regional yang menunjukkan interdependensi yang dikembangkan untuk memelihara kesejahteraan, meningkatkan nilai-nilai bersama, serta memecahkan masalah bersama.

ASEAN Economic Community adalah salah satu cara ASEAN untuk mewujudkan stabilitas ekonomi. Dengan diterapkannya AEC, akan ada beberapa kesepakatan yang harus dilakukan, seperti penghapusan hambatan baik hambatan tarif maupun non tarif, serta penghapusan batasan kuota. Hal tersebut menjadikan persaingan antar anggota ASEAN semakin ketat. Namun kondisi ekonomi antar anggota ASEAN yang kurang seimbang dikhawatirkan akan melenceng dari tujuan awalnya, untuk memakmurkan seluruh negara anggota. Karena ketatnya persaingan di pasar bebas yang akan dijalankan dalam ASEAN Economic Community memiliki

kemungkinan untuk menjadi peluang bagi negara yang mandiri dan siap ekonominya, serta menjadi ancaman bagi negara yang belum siap secara ekonomi. Ketidak siapan tersebut kemungkinan akan menjadi bumerang , karena kurangnya daya saing dikhawatirkan akan menjadikan sebuah negara hanya berperan sebagai pasar, tanpa mampu untuk menjual produknya sendiri di pasar lokal.

2. Neoliberalisme

Paradigma neoliberalisme ini muncul akibat ketidak puasan masyarakat akan paham Keynesian dengan “*Big Government*”-nya. *Big Government* (pemerintah berkuasa di semua lini) yang dibawa oleh John Maynard Keynes yang pada mulanya dianggap sebagai “penolong” atas keterpurukan ekonomi pasca Perang Dunia II dan runtuhnya pasar saham Wall Street kini dipandang sebagai penghambat bagi individu kala itu.

Perubahan terjadi pada akhir tahun 1973, ketika negara-negara Arab, produsen minyak utama dunia, membentuk sebuah kartel, OPEC, dan menyebabkan harga minyak melambung tinggi.¹⁹ Harga minyak yang cenderung terus meningkat menyebabkan harga barang-barang serta upah tenaga kerja ikut bergerak naik. Akibat lebih jauh adalah terjadinya resesi ekonomi, pengangguran dan inflasi harga mencapai lebih dari 20 persen di sejumlah negara , serta meluasnya ketidakmampuan negara-negara Dunia Ketiga untuk membayar hutangnya.²⁰

19 I. Wibowo dan Francis Wahono, *NEOLIBERALISME*, Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta, 2003, hal 19

20 Ibid

Kegagalan dari paradigma Keynesian ini kemudian memunculkan paradigma neoliberal menggeser posisinya sebagai paradigma dominan. Neoliberalisme menganggap kegagalan Keynesian karena ketidak mampuannya dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi pada waktu tersebut dan karena intervensi negara dengan *Big Government*-nya terhadap perekonomian dianggap tidak cukup mendisiplinkan sistem moneter dan perdagangan internasional.

Terdapat tiga pilar utama paradigma neoliberal, yaitu disiplin fiskal (*fiscal austerity*), privatisasi, dan liberalisasi pasar bebas.²¹

a) Disiplin Fiskal

Disiplin fiskal dalam berbagai diskus akademik ini mengatur tentang pengeluaran dan pendapatan sebuah negara yang berkaitan dengan pajak. Disiplin ini berfokus terhadap pengalokasian pendapatan dan belanja pemerintah. Kaum neoliberal berasumsi bahwa ada beberapa pengeluaran pemerintah yang harus dihapus atau dikurangi secara bertahap, yaitu untuk pengeluaran kebutuhan publik (*subsidi / welfare*). Mereka berpendapat bahwa dengan adanya subsidi akan menimbulkan persaingan pasar yang kurang sehat. Karena dengan subsidi sudah tentu kalau harga barang yang dihasilkan akan lebih bersaing. Dan adanya *welfare* tersebut menyebabkan kemalasan dan ketergantungan sebagian golongan masyarakat terhadap pemerintah yang bermuara pada penurunan produktivitas.

21 Departemen Perdagangan Republik Indonesia : *Menuju Asean Economic Community*

b) Privatisasi

Privatisasi adalah proses pengalihan kepemilikan dari milik umum menjadi milik pribadi.²² Kebijakan privatisasi BUMN dipandang sebagai salah satu langkah untuk membatasi peran negara dalam bidang ekonomi dan memberi kesempatan kepada swasta. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan efisiensi perusahaan yang berujung pada pertumbuhan ekonomi suatu negara.

c) Liberalisasi Pasar

Agenda utama liberalisasi perdagangan adalah mereduksi hambatan perdagangan (*trade barriers*) baik untuk barang, jasa, hak milik intelektual maupun investasi.²³ Seringkali ditemui berbagai hambatan ketika melakukan perdagangan melewati lintas batas negara. Hambatan-hambatan inilah yang ditentang oleh kaum neoliberalis. Karenanya mereka menginginkan liberalisasi pasar dengan menghapuskan hambatan-hambatan tarif maupun non tarif.

22 PRIVATISASI BUMN : Langkah Peningkatan Kualitas Barang dan Pelayanan Publik: diakses dari http://fatkhan-ashari-fisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail-49972-c-%20Birokrasi-PRIVATISASI%20BUMN:%20Langkah%20%20Peningkatan%20Kualitas%20%20Barang%20dan%20Pelayanan%20Publik.html pada 26 juni 2015

23 Kemenkeu: *Siapkah Indonesia Menghadapi Liberalisasi Perdagangan?* Diakses dari <http://www.kemenkeu.go.id/en/node/41244> pada 26 juni 2015

Kebijakan-kebijakan pembangunan dari paradigma ini didasarkan pada sebuah model sederhana ekonomi pasar, ekuilibrium kompetitif, yang berakar pada prinsip “*invisible hand*” Adam Smith yang diasumsikan dapat bekerja dengan sempurna. Mereka percaya bahwa kemajuan dari sebagian kelompok akan memberikan dampak positif kepada kelompok yang lain, sehingga akan memperkecil kesenjangan ekonomi diantara keduanya.

Adapun asumsi-asumsi dasar dari paradigma ini antara lain adalah meletakkan pasar sebagai aktor atau pelaku utama dalam ekonomi, liberalisasi pasar dalam bentuk kebebasan pergerakan barang, jasa, investasi dan modal tanpa adanya intervensi negara, menghilangkan semua pengeluaran negara untuk pemenuhan kebutuhan publik (*public goods*) atau meminimalisirnya secara bertahap, deregulasi semua kebijakan negara yang membatasi mekanisme pasar, privatisasi dengan menjual aset-aset negara kepada pasar.²⁴

Dalam pandangan neoliberalis, kebebasan pasar adalah hal paling utama. Tidak seperti paham Keynesian yang memberikan ruang terhadap pemerintah untuk mengintervensi pasar, Neoliberal berasumsi bahwa pasar merupakan aktor paling relevan dan efektif dalam menentukan keberhasilan ekonomi dalam suatu negara, dan menganggap campur tangan pemerintah sebagai penghambat, dikarenakan adanya intervensi serta hambatan-hambatan tersebut menjadikan pasar tidak mampu leluasa melakukan kegiatan ekonominya. Oleh karena itu kaum neoliberal bersikeras bahwa

24 Ibid

peran negara harus dibatasi dan mendukung penghapusan hambatan tarif dan non tarif, sehingga dengan adanya liberalisasi akan mempermudah pasar dalam melakukan ekspansi ke wilayah lain.

ASEAN Economic Community, bentuk kerjasama antar negara anggota ASEAN dalam bidang ekonomi yang merupakan salah satu pilar dari ASEAN Vision 2020, dimana di dalamnya terdapat kepentingan bersama negara-negara anggota ASEAN untuk memperluas dan meningkatkan integrasi ekonomi. Berdasarkan cetak biru yang telah diadopsi oleh seluruh negara anggota ASEAN, kawasan Asia Tenggara melalui pembentukan *ASEAN Economic Community* akan dirubah menjadi sebuah pasar tunggal dan basis produksi, sebuah kawasan yang sangat kompetitif, sebuah kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, dan sebuah kawasan yang terintegrasi penuh dengan perekonomian global.²⁵

ASEAN Economic Community merupakan bentuk kerjasama regional ASEAN yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita bersama, salah satunya adalah untuk memperkecil kesenjangan ekonomi antar negara anggota. Namun sayangnya, kerjasama regional ini mengambil nilai-nilai yang terdapat pada paham neoliberal, seperti yang termuat dalam tujuan AEC yaitu untuk menjadikan wilayah Asia Tenggara sebagai pasar tunggal dan basis produksi. Pembentukan kawasan Asia Tenggara sebagai sebuah pasar tunggal dan basis produksi ini bermakna dihapuskannya segala bentuk hambatan

25 *ASEAN Economic Community Blueprint*, diakses dari <http://www.aseansec.org/21083.pdf>

bagi pergerakan barang dan jasa serta faktor produksi dalam melintasi batas-batas negara-bangsa di Asia Tenggara.

Konsekuensi dari diterapkannya nilai-nilai neoliberalisme akan berdampak pada penguasaan pasar oleh swasta, minimnya campur tangan pemerintah atau bahkan ditiadakan, serta privatisasi perusahaan negara. Artinya, pemilik modal lah yang akan menguasai pasar, dan mereka bebas menggerakkan kemana arah perdagangan akan dijalankan. Lebih buruk lagi, peran pemerintah tidak dapat bergerak terlalu jauh apabila swasta sebagai pemilik modal memainkan harga yang akan mencekik masyarakat. Sedangkan keadaan ekonomi antar negara anggota ASEAN tidaklah merata, sehingga memungkinkan terjadinya kemerosotan pada negara anggota yang kurang memiliki kesiapan untuk menghadapi perdagangan bebas tersebut.

Bebasnya pergerakan aktivitas ekonomi dalam integrasi sebuah kawasan, membutuhkan daya saing ekonomi yang tinggi untuk menghindari dampak negatif menurunnya performa ekonomi dalam negeri karena serbuan produk-produk dari negara lain yang berdaya saing lebih tinggi. Kesiapan fundamental ekonomi, eksistensi institusi dan regulasi yang kuat, adalah syarat mutlak yang harus dimiliki suatu negara secara matang sebelum menerapkan prinsip ekonomi pasar bebas.²⁶ Artinya, penerapan neoliberalisme dalam bentuk liberalisasi, privatisasi, maupun deregulasi tidak bisa dilakukan secara spontan, karena kesiapan ekonomi Indonesia

26 Dodi Mantra. *Hegemoni & Diskursus Neoliberalisme : Menelusuri Langkah Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*, hal 8

menjadi suatu hal yang penting untuk menghindari dampak negatif dari neoliberalisme.

Pertanian adalah salah satu produk Indonesia yang dominan. Oleh karena itu, kesiapan sektor pertanian Indonesia harus dipersiapkan dengan matang sehingga dapat bersaing dengan produk-produk serupa di pasar bebas kawasan ASEAN, serta dapat menghindari dampak negatif pasar bebas yang berujung pada tumbangnya sektor pertanian domestik.

D. HIPOTESA

Berdasarkan kerangka teori di atas maka penulis mencoba membuat dan merumuskan hipotesa. Hipotesa adalah sebuah dugaan awal atau jawaban sementara terhadap suatu masalah dalam sebuah karya tulis. Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka penulis mengambil dugaan sementara :

AEC akan menjadi ancaman bagi sektor tanaman pangan Indonesia. Karena liberalisasi pasar yang diterapkan AEC akan menjadikan arus bebas barang, sehingga produk tanaman pangan Indonesia tidak kompetitif.

E. JANGKAUAN PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis memberikan batasan waktu dengan maksud untuk mempermudah analisa yang akan dilakukan sehingga penulisan ini menjadi jelas. Adapun batasan waktu yang dipilih adalah rentang waktu antara tahun 2010-2015.

F. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi pustaka untuk mendapatkan data-data sekunder melalui buku-buku perpustakaan, jurnal-jurnal, makalah-makalah maupun surat kabar dan situs-situs terkait. Tidak cukup kemungkinan data juga diperoleh melalui media elektronik yang akan di usahakan kevalidannya dengan fakta-fakta yang mendukung. Kemudian data ini diolah dan dianalisa guna membahas permasalahan yang ada.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian, maka penulis membuat beberapa bab, yang diantaranya adalah

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab I merupakan pendahuluan yang memuat alasan pemilihan judul, tujuan penulisan skripsi, latar belakang permasalahan, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II : Sekilas tentang ASEAN Economic Community

Bab II mengulas sedikit tentang ASEAN dan *ASEAN Economic Community*.

BAB III : Posisi Indonesia dalam ASEAN

Dalam bab III ini penulis akan mengulas tentang bagaimana posisi sektor pertanian Indonesia di ASEAN.

BAB IV : Ancaman sektor pertanian Indonesia oleh liberalisasi ekonomi

Bab ke IV penulis akan menjabarkan mengenai ancaman AEC bagi sektor pertanian Indonesia.

BAB V : Kesimpulan

Bab ke V penulis akan menjabarkan kesimpulan di dapat dari karya tulis ini.